

Tinjauan yuridis izin usaha pertambangan batu bara dalam hal investasi berkaitan dengan moratorium kehutanan

Prakoso Anto Nugroho, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312637&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara? negara lain sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusaha mengakomodir perusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezim kontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memiliki beberapa kendala. Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagai solusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan dengan pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang juga berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakan undang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim investasi pertambangan di Indonesia.

<hr>

Abstrak

Indonesia is a country with a very rich natural resources. Among them are minerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by other countries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used for the prosperity of the people, the Government sought to accommodate entrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start of contract regime until the regime of mining business license has several constraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry is considered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect on mining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment in Indonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerning investment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issued by government is to assure the investment climate of mining in Indonesia